



**KAJIAN PENENTUAN BENTUK PENGEMBANGAN WILAYAH KURIMA
KABUPATEN YAHUKIMO PAPUA**

Simson Harefa Hesegem¹ dan Samsul Ma'rif²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Email: netaiken_hesegem@ymail.com

Abstrak: Tujuan pemekaran wilayah adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, setelah beberapa tahun berjalan ada indikasi bahwa pembangunan di Kabupaten Yahukimo yang dimekarkan pada tahun 2002 dari Kabupaten Jayawijaya oleh sebagian masyarakat dianggap tidak bisa memenuhi aspirasi menjawab tujuan dari pemekaran. Hal ini diindikasikan oleh munculnya kesenjangan pembangunan antar-distrik yang dekat dengan pusat pemerintahan dengan distrik yang jauh dari pusat pemerintahan. Salah satu wilayah dalam Kabupaten Yahukimo yang mengalami stagnasi pembangunan adalah Kurima. Sampai saat ini, masyarakat yang berdomisili di distrik Kurima belum merasakan dampak pemekaran kabupaten Yahukimo. Hal tersebut terlihat dari belum adanya pembangunan berupa pembangunan fasilitas fisik seperti fasilitas kesehatan yang tidak memadai, kantor pemerintahan tidak layak dipakai dan fasilitas pendidikan yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini kemudian memicu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan munculnya aspirasi pembentukan kabupaten baru yang terpisah dengan Kabupaten Yahukimo, bergabung kembali dengan Kabupaten Jayawijaya dan tetap berada dalam lingkup Kabupaten Yahukimo. Berdasarkan ketiga alternatif upaya pengembangan wilayah Distrik Kurima yang mengemuka ini, maka penelitian ini kemudian dilakukan. Metode yang digunakan adalah dengan deskriptif didukung teknis analisis proses hierarki analitik (PHA) dan didukung oleh analisis kualitatif. Hasil analisis PHA yang melibatkan beberapa narasumber terkait sebagai pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Yahukimo, khususnya di Distrik Kurima memperlihatkan bahwa alternatif terpilih adalah Pembentukan Kabupaten Baru yang terpisah dari Kabupaten Yahukimo. Implikasi dari terpilihnya pembentukan kabupaten baru adalah penentuan ibukota kabupaten sebagai pusat pemerintahan dan cakupan wilayah kabupaten. Berdasarkan analisis pusat pemerintahan dengan beberapa kriteria, skor tertinggi terletak di Distrik Kurima diikuti oleh Tangma, dan Silimo. Adapun cakupan wilayah meliputi distrik-distrik yang tergabung dalam konfederasi lima suku yaitu, Yali, Hubla, Kimyal, Momuna dan Me. Upaya mewujudkan sebagai kabupaten baru berdasarkan analisis kesiapan yang dilihat dari aspek kependudukan dan lahan, infrastruktur fisik, kelembagaan SDM pemerintahan, manajemen konflik dan demokrasi serta kapasitas ekonomi sumber daya dan sektor unggulan menunjukkan bahwa Kurima memiliki kapasitas yang kuat menjadi daerah otonom.

Kata Kunci : Pengembangan Wilayah, Kurima, Papua

Abstract: Objective of regional expansion is as a means to improve the welfare of the community. In its development, after several years of running no indication that the development of the

district Yahukimo that bloomed in 2002 from district glorious victory is considered by most people can not answer the purpose of fulfilling the aspirations of the division. This is indicated by the appearance of the construction of inter-district disparities are close to the center of the district administration that is far from the central government. one of the areas in which Yahukimo district stagnated development is kurima. until now, the people who live in the district have not felt the impact of the expansion kurima Yahukimo district. it is evident from the lack of development in the form of construction of physical facilities such as inadequate health facilities, government offices and facilities is not feasible to use a very poor education. This condition triggers an attempt to resolve the issue with the advent of the new aspirations of forming a separate district by district Yahukimo, rejoined Jayawijaya and remain within the scope of district Yahukimo. The third is based on district alternative development efforts that surfaced this region, then the research is then conducted. method used is descriptive supported by technical analysis technical analysis supported the analytic hierarchy process (pha) and supported by qualitative analysis. pha analysis involving multiple sources related to the stakeholders of development in the district of Yahukimo. the implications of the election of new district formation is the determination of the district as the center pemerintahan with some criteria, the highest score in the district located kurima followed by Tangma, and Silimo. As for the coverage area includes the districts that are members of the confederation of five tribes namely, yah, Hubla, kimyal, momuna dwn me. efforts to create a new district based on the readiness analysis from the aspects of population and land, physical infrastructure, institutional tbsp governance, conflict management and democracy as well as economic capacity and resources leading sectors shows that kurima has a strong capacity to be autonomous.

Keywords: *the development of the, Kurima, Papua*

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi telah memberikan perubahan yang mendasar dalam kebijakan pembangunan nasional baik dari pusat hingga ke daerah. Perubahan tersebut terletak pada semakin besarnya peranan daerah otonom setingkat dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Desentralisasi Provinsi Papua ditanggapi sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia terutama pada kebijakan pemekaran wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, wacana pemekaran wilayah muncul dalam rangka untuk menanggulangi permasalahan pelayanan dan pemerataan pembangunan, sekaligus menjadi kebutuhan dan langkah strategis tercapainya pemerataan pembangunan.

Sejak dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2002, perkembangan pembangunan di Kabupaten Yahukimo dianggap stagnan terutama yang jauh dari pusat pemerintahan. Indikasinya dilihat dari

tersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur yang tidak bertambah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Salah satu wilayah dalam Kabupaten Yahukimo yang mengalami stagnasi adalah Distrik Kurima. Terhambatnya pembangunan di Kabupaten Yahukimo adalah karena 1) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo yang tidak merata, 2) Tidak tersedianya akses yang menghubungkan antara distrik-distrik yang ada dengan pusat pemerintahan Kabupaten Yahukimo, 3) Jarak atau jangkauan wilayah yang sangat luas serta kondisi geografis yang tidak mendukung. Ketiga hal ini mengakibatkan pembangunan di distrik-distrik dari Kabupaten Yahukimo stagnan.

Secara administrasi posisi Kurima berada di dalam wilayah Kabupaten Yahukimo, namun secara fisik lebih dekat dengan Kabupaten Jayawijaya sehingga berimplikasi pada jangkauan pelayanan public yang lebih banyak menerima pengaruh dari Kabupaten Jayawijaya. Kecenderungan integrasi Kurima

dengan Kabupaten Jayawijaya relatif lebih intensif di sebabkan oleh kedekatan lokasi dan akses yang relatif terbuka serta memiliki kesamaan budaya dan bahasa, adat istiadat, agama, suku, dan hampir 80% putra-putri dari Kurima setelah tamat dari Sekolah Dasar, atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama melanjutkan ke jenjang berikutnya di Kabupaten Jayawijaya. Ada juga yang bekerja di Kabupaten Jayawijaya sebagai guru, pegawai negeri sipil, bahkan sebagai aparat keamanan seperti polisi dan tentara. Selain itu ada pula yang mengadu nasib sebagai buruh bangunan, tukang becak, ojek, supir angkutan umum, bahkan penjual-penjual dipasar seperti ibu-ibu yang menjual sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan pinang (nginang).

Pembangunan di Kurima bukan saja pembangunan secara fisik yang tertunda namun pertumbuhan ekonomipun sangat lambat. Jika dilihat potensi wilayah tersebut sangat memadai terutama dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Selain itu, Kurima memiliki potensi pariwisata yang besar dimana tiap tahunnya diperkirakan hampir tiga ratus turis mancanegara datang berkunjung. Wisatawan mancanegara bisa menghabiskan belanja sekitar ± 50-70 jutaan. Selain itu, Kurima juga memiliki luas wilayah yang cukup besar, jumlah penduduk yang padat dibanding distrik-distrik lain yang ada di Kabupaten Yahukimo, keaneka ragaman suku, budaya, bahasa, adat-istiadat, agama dan bahkan sudah lama hidup berdampingan dengan masyarakat setempat.

Akibat dari stagnasi yang terjadi, mengemuka alternatif pembentukan daerah baru, bergabung dengan Kabupaten Jayawijaya atau tetap dalam wilayah Kabupaten Yahukimo sebagai upaya bentuk pengembangan wilayah Kurima ke depan. Atas dasar permasalahan upaya pengembangan wilayah ini maka tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji alternatif penentuan bentuk pengembangan keruangan Distrik Kurima yang sebaiknya dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode survey Deskriptif. Metode ini digunakan

untuk mengumpulkan data hasil survey dengan pengamatan sederhana. Selanjutnya peneliti menggolongkan kejadian-kejadian tersebut berdasarkan pengamatan melalui penyebaran kuisioner, wawancara/pengumpulan pendapat, dan pengamatan langsung secara fisik dilapangan. Teknik analisis yang dilakukan antara lain:

1. AHP (*Analisis Hirarki Proses*)

Penggunaan metode AHP yang berbasis computer (*Expert Choise*), dalam analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi narasumber tentang alternative bentuk pengembangan wilayah Kurima yang diturunkan dari perspektif UU No. 32 Tahun 2004. Persepsi narasumber dalam hal ini dieksplorasi dari pemahaman mereka tentang kondisi perkembangan wilayah studi, khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat. Kedua faktor ini secara paralel menentukan bobot penilaian, yaitu faktor beban dan manfaat. Untuk bisa memberikan penilain yang bersifat kuantitatif (pembobotan) dari faktor manfaat dan beban, variabel-variabel manfaat dan beban yang digunakan disusun kedalam masing-masing hierarki, yaitu hierarki manfaat dan hierarki beban.

2. Analisis Pemilihan Cakupan Wilayah

Pemilihan cakupan wilayah ini dilakukan berdasarkan jarak antara distrik yang satu dengan distrik lain, persamaan bahasa daerah, perkawinan campur antara distrik yang masuk dalam cakupan wilayah studi, kebudayaan atau adat-istiadat dimana didalamnya menyangkut kebiasaan bercocok tanam, penyelenggaraan acara-acara yang dipandang sakral seperti upacara-upacara pernikahan, pemakaman, buka lahan baru dan pelantikan kepala suku atau pengalihan kekuasaan jabatan kepala suku. Hal ini menjadi landasan utama pemilihan cakupan wilayah karena Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu daerah yang masih kuat dengan kepercayaan animisme dan ikatan hubungan kekeabatan yang kuat.

3. Analisis Pusat Pemerintahan

Analisis pusat pemerintahan untuk bakal calon daerah baru yang akan terbentuk dari hasil regionalisasi menjadi langkah penting untuk dilakukan karena daerah yang baru memerlukan pusat pemerintahan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Tujuannya adalah (1) memberikan kemudahan dalam mengontrol dan mengendalikan proses pengembangan kota; (2) lebih mengefisienkan sistem pelayanan dari berbagai fasilitas pelayanan penduduk; (3) mewujudkan kemudahan pencapaian dengan pengaturan jangkauan pelayanan.

4. Penentuan Narasumber

Didalam penelitian ini, ada beberapa *stakeholder* yang dijadikan sebagai tokoh atau orang-orang yang tepat untuk diwawancarai guna memperoleh informasi yang akurat. Sedangkan *stakeholder* disini adalah pihak atau para pakar yang mengetahui permasalahan atau tema yang diangkat peneliti. Metode yang digunakan dalam pemilihan narasumber adalah teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*). Dalam penelitian ini ditetapkan jumlah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap analisis ini menggunakan metode AHP yaitu dengan mengstrukturkan masalah dalam bentuk hirarki dan memasukkan pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif. Pada proses perhitungan metode AHP digunakan proses *Expet Choice*. Program tersebut akan membantu dalam penilaian melalui perbandingan berpasangan yang digunakan untuk menentukan nilai. Hirarki alternatif bentuk pengembangan wilayah distrik Kurima Kabupaten Yahukimo tersusun atas 4 (empat) tingkat, yaitu:

1 Fokus

Tingkatan ini menunjukkan tujuan diterapkannya metode AHP untuk mengetahui alternatif dari bentuk pengembangan wilayah distrik kurima yang tepat.

2 Bidang

narasumber sebanyak 17 orang. Pertimbangan jumlah 17 orang adalah karena dalam penerapan metode AHP ukuran sampel yang digunakan adalah bebas. Masing-masing kelompok narasumber ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan atau jabatan yang sedang dipangku. Adapun komposisi narasumber adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah (Asisten Pembangunan, Asisten Tata Pemerintahan, Asisten Kesra, Kepala Bappeda, Dinas Kesbanglinmas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Pelayanan Terpadu)
2. Kelompok tokoh masyarakat (Kepala suku dari Distrik Kurima, tokoh pemuda, tokoh gereja, tokoh perempuan dan anggota DPRD)
3. Kelompok swasta (pengusaha lokal maupun pendatang)

- a. Pemerintahan. Meliputi, pembentukan lembaga khusus pengelola pembangunan wilayah di Kabupaten Yahukimo, peningkatan kemampuan aparatur, efisiensi dan efektifitas tugas pengelolaan pembangunan, serta kejelasan batas-batas wilayah.
- b. Pembangunan. Meliputi, pengembangan wilayah Kabupaten Yahukimo, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergis perencanaan pembangunan dan peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan wilayah Kabupaten Yahukimo.
- c. Kemasyarakatan. Manfaat bentuk kelembagaan Kabupaten Yahukimo ditinjau dari peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan kemandirian ekonomi wilayah, dan peningkatan disiplin.

3 Kriteria

Tingkatan ini merupakan penjabaran dari masing-masing bidang dalam suatu kriteria sesuai dengan visi dan misi Kepala daerah mengenai arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Yahukimo yang tercakup dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:

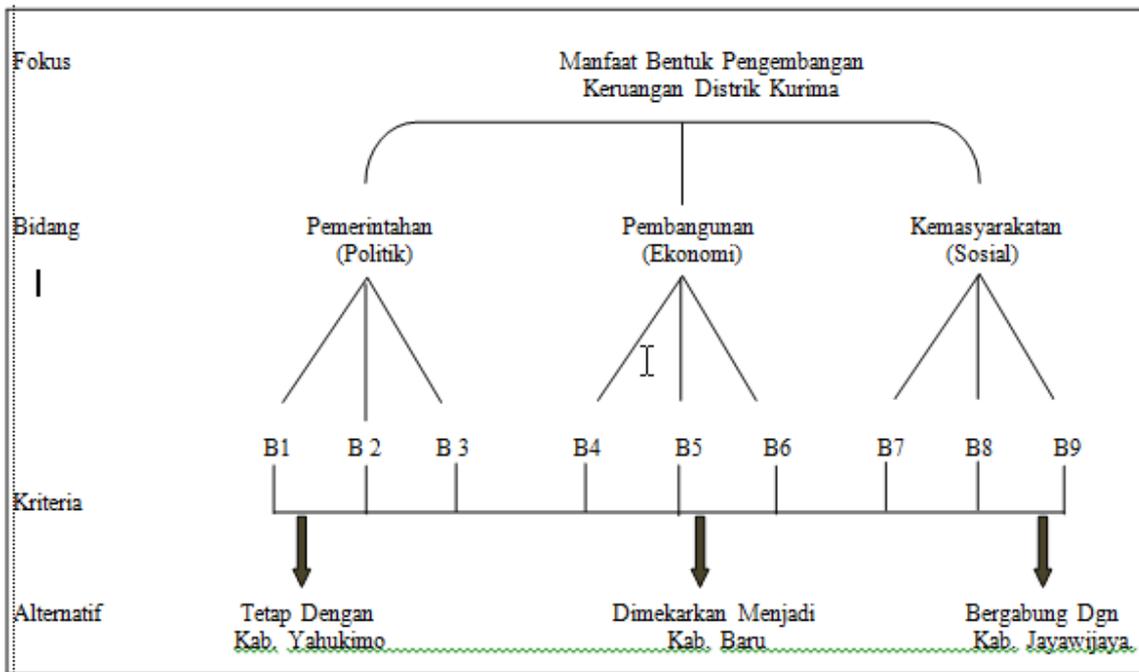
1. Bidang Pemerintahan
 - a) Pertumbuhan penduduk
 - b) Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang
 - c) Efisiensi dan efektifitas pengelolaan pembangunan
2. Bidang Pembangunan
 - a) Koordinasi dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan
 - b) Peningkatan kelembagaan/organisasi
 - c) Pengelolaan dan pengembangan potensi daerah
3. Bidang Kemasyarakatan
 - a) Peningkatan pelayanan publik.
 - b) Peningkatan produktifitas ekonomi daerah (masyarakat).
 - c) Pengembangan potensi sumber daya manusia.
- 4 Alternatif

Pada tingkatan ini merupakan pilihan yang akan dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk pengembangan wilayah berdasarkan bidang dan kriteria pengembangan wilayah pada tingkatan sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan pada bagian metodologi, penilaian setiap alternatif diperoleh dari persepsi

narasumber sebagai control terhadap setiap alternatif bentuk pengembangan wilayah. Alternatif tersebut adalah *Dimekarkan menjadi kabupaten baru*. Bentuk pengembangan wilayah ini muncul dari adanya fregmentasi keruangan (sebaran geografis dan ketimpangan pelayanan, infrastruktur dan ekonomi) di wilayah, terutama dilihat dari segi luas wilayah induk. *Bergabung Dengan Kabupaten Jayawijaya*. Kegiatan penggabungan daerah ini dilakukan berdasarkan pengalaman sebelum pemekaran wilayah Kabupaten Yahukimo. Pada waktu itu distrik-distrik ini adalah bagian dari Kabupaten Jayawijaya. Selama itu tidak ada permasalahan seperti yang terjadi sekarang ini dimana masyarakat tidak merasakan dampak dari pemekaran wilayah Kabupaten Yahukimo bahkan masyarakat tidak merasakan pelayanan pemerintah.

1. Tetap Dengan Kabupaten Yahukimo

Tujuan pemekaran wilayah adalah memperpendek rentang kendali antara pusat dengan daerah serta meningkatkan pertumbuhan pembangunan di daerah guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Dengan tetap menjadi bagian dari Kabupaten Yahukimo ini, diharapkan pemerintah Kabupaten Yahukimo dapat mengambil kebijakan yang tepat demi meningkatkan pertumbuhan pembangunan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.



Sumber : Analisis 2013

GAMBAR I. PROSES ANALISIS HIRARKI (AHP)

TABEL II. PERHITUNGAN NILAI KONSISTENSI

No	Kode Narasumber	Nilai VP			Nilai Inkonsistensi
		Pemekaran	Bergabung	Tetap	
1	B1	0,490	0,424	0,086	0,41
2	B2	0,544	0,376	0,080	0,43
3	B3	0,482	0,442	0,076	0,45
4	B4	0,400	0,333	0,267	0,45
5	B5	0,503	0,419	0,078	0,44
6	B6	0,574	0,320	0,105	0,43
7	B7	0,466	0,421	0,113	0,45
8	B8	0,404	0,385	0,211	0,65
9	B9	0,448	0,422	0,130	0,42
10	B10	0,538	0,358	0,104	0,44
11	B11	0,467	0,400	0,134	0,5
12	B12	0,525	0,381	0,094	0,44
13	B13	0,400	0,333	0,267	0,45
14	B14	0,622	0,303	0,075	0,39
15	B15	0,564	0,302	0,134	0,48
16	B16	0,629	0,233	0,138	0,43
17	B17	0,643	0,280	0,077	0,38
	Rata-rata	0,511	0,360	0,127	0,44

Sumber: Analisis 2013

Nilai konsistensi menunjukkan tingkat konsistensi tiap-tiap narasumber terhadap hasil keputusan yang telah dibuatnya. Apabila IK mendekati 0, maka makin konsisten suatu observasi. Tetapi metode AHP

mengharuskan $IK = 0$ terutama apabila terdiri dari banyak kriteria atau alternatif. Sedangkan pada *Expert Choice* suatu jawaban nilai inkonsistensi sebesar 1 atau lebih memerlukan investigasi lebih lanjut. Maksudnya, nilai

inkonsistensi 1 atau lebih tersebut menandakan bahwa narasumber kurang memiliki informasi atau pengetahuan yang lebih.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan terhadap nilai inkonsistensi masing-masing narasumber didapatkan bahwa secara keseluruhan tidak ada nilai inkonsistensi nilai yang bernilai 1 atau lebih. Nilai inkonsistensi tertinggi dimiliki oleh narasumber dengan kode B8 sebesar 0,65. Tetapi hal ini masih dianggap wajar karena batasan nilai inkonsistensi pada *Expert Choice* adalah 1, sedangkan untuk nilai inkonsistensi terendah adalah narasumber dengan kode B11 yaitu 0,5. Dari nilai inkonsistensi yang didapatkan secara keseluruhan dapat dilakukan perhitungan rata-rata nilai inkonsistensi. Rata-rata nilai inkonsistensi adalah sebesar 0,44 dengan kata lain dari hasil nilai inkonsistensi diatas menandakan narasumber kurang konsisten karena nilai inkonsistensinya 0,44 atau karena lebih dari 0,2 dan kurang dari 0,5.

Rencana pembagian wilayah perencanaan merupakan bentuk perencanaan struktur tata ruang yang ditujukan untuk tercapainya pemerataan pembangunan wilayah antara pusat dan pinggiran sesuai dengan potensi dan fungsi kegiatan wilayah. Pembagian wilayah perencanaan dilakukan dengan pembentukan satuan unit lingkungan. Pembentukan satuan unit lingkungan dilakukan sebagai usaha: (1) memberikan kemudahan dalam mengontrol dan mengendalikan proses pengembangan kota; (2) lebih mengefisienkan sistem pelayanan dari berbagai fasilitas pelayanan penduduk; (3) mewujudkan kemudahan pencapaian dengan pengaturan jangkauan pelayanan.

Berdasarkan kriteria penentuan satuan unit lingkungan (kondisi fisik geograifs, batas administrasi, karakteristik kegiatan, karakteristik penggunaan lahan, daya dukung penduduk dan jangkauan pelayanan), maka

memperhatikan beberapa hal yaitu Penentuan lokasi calon ibukota daerah baru yang akan terbentuk dari hasil regionalisasi menjadi langkah penting untuk dilakukan karena daerah yang baru memerlukan pusat pemerintahan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Kedudukan ibu kota bukan hanya sebagai puat kegiatan pemerintahan dan perekonomian saja, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai pusat pertumbuhan untuk mendorong perkembangan dan kesejahteraan daerah-daerah disekitarnya. Terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan lokasi yang tepat dan layak sebagai ibu kota daerah baru.

TABEL III. KRITERIA LOKASI IBUKOTA

Kriteria	Menurut Mariana (2005)					
	Kurima	Tangma	Suru-suru	Obio	Silimo	Pasema
Pelayanan fasilitas publik	✓	-	-	-	✓	-
Aksesibilitas	✓	-	-	-	-	-
Perkembangan sosekbud	✓	✓	✓	✓	✓	-
Daya dukung lahan	✓	-	✓	-	✓	✓
Bencana alam	✓	-	-	-	-	-
Lahan non produktif	✓	✓	-	-	-	-
Pusat pertumbuhan	-	✓	-	-	-	-
Iklim	✓	✓	-	-	-	-
Kriteria	Menurut Kuncoro (2002)					
	Kurima	Tangma	Suru-suru	Obio	Silimo	Pasema
Fasilitas pelayanan publik	✓	-	-	-	✓	-
Aksesibilitas	✓	-	-	-	-	-
Perkembangan sosekbud	✓	✓	✓	✓	✓	-
Daya dukung lahan	✓	-	✓	-	✓	✓
Bencana alam	✓	-	-	-	-	-
Lahan non produktif	✓	✓	-	-	-	-
Pusat pertumbuhan	-	✓	-	-	-	-
Iklim	✓	✓	-	-	-	-

Sumber : Analisis 2013

Mengacu pada tabel kriteria lokasi ibukota diatas, dapat disimpulkan bahwa Kurima layak menjadi bakal calon lokasi ibu kota nantinya dibanding Tangma maupun distrik lain yang juga menjadi calon ibukota kabupaten nantinya. Dari semua kriteria, Kurima hanya kurang satu yaitu pusat pertumbuhan sedangkan selainnya memenuhi syarat. Distrik Tangma juga hanya dari beberapa hal Tangma tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibukota kabupaten begitu pula dengan distrik lainnya. Dengan melihat pertimbangan yang ada dari kriteria penentuan lokasi ibukota atau pusat pemerintahan, maka ada enam (6) wilayah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pusat pemerintahan untuk Kurima yaitu Kurima, Tangma, Suru-suru, Obio, Silimo, dan Pasema. Keenam distrik ini masing-masing memiliki kelebihan yang mengakibatkan dipilih menjadi bakal ibukota pemerintahan nantinya. Namun berdasarkan kesiapan dan sarana prasarana maupun fasilitas fisik yang ada, lebih berat pada Distrik Kurima karena fasilitas fisik seperti aksesibilitas yang baik dan juga akses menuju distrik lain tersedia, lapangan terbang, sarana pendidikan dari TK-SMU, fasilitas kesehatan (puskesmas), fasilitas pemerintahan

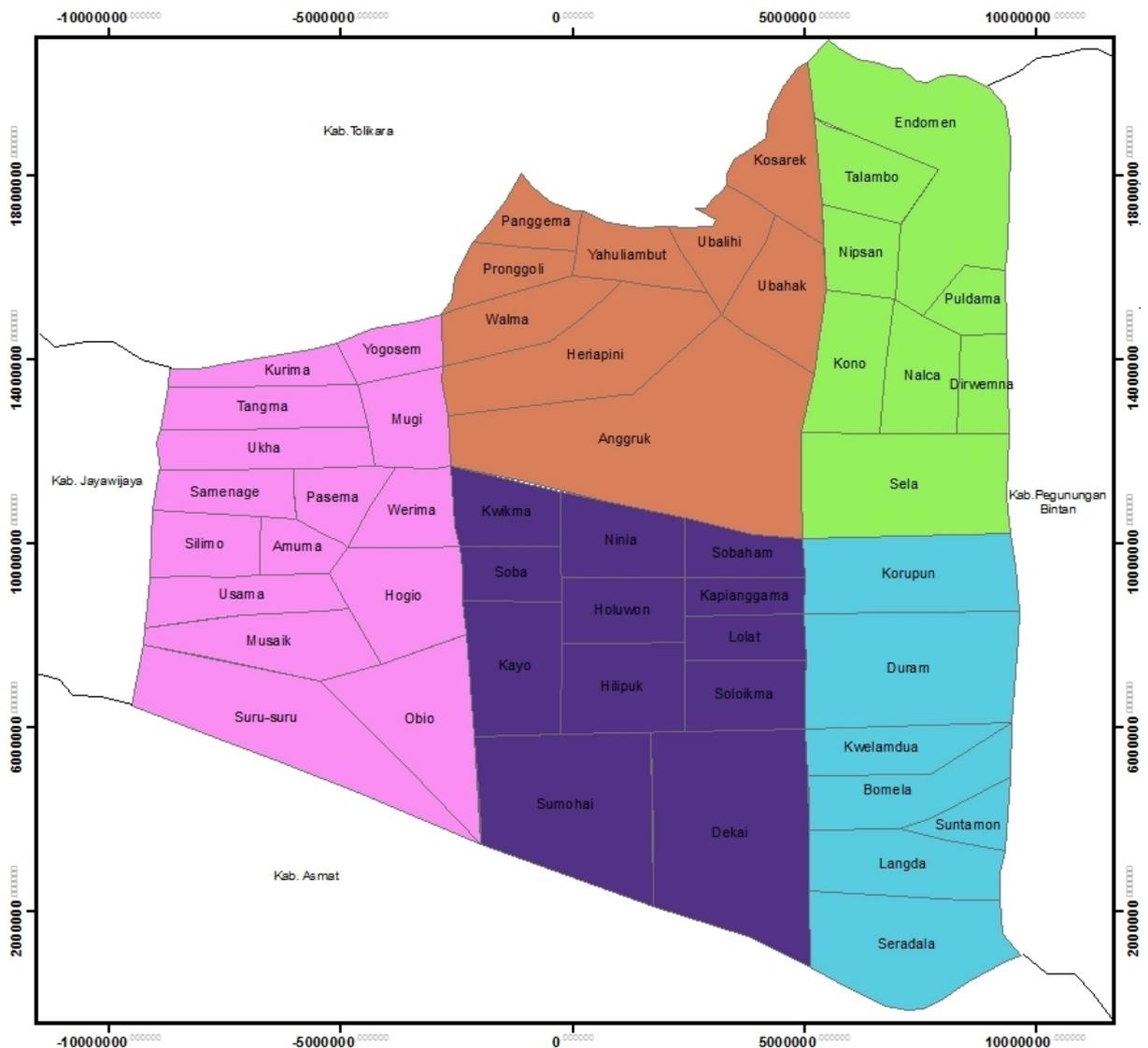
(kantor camat, lurah), fasilitas keamanan (polsek dan koramil). Selain itu, Kurima juga memiliki luas wilayah yang besar dibanding distrik lain bahkan Distrik lain yang masuk sebagaicalon ibukota, bahkanmemiliki dataran yang rata.

Distrik Tangma juga memiliki kelebihan yang menjadi pertimbangan yaitu selain memiliki luas wilayah yang cukup, lapangan terbang, sarana pendidikan dan kesehatan distrik ini lebih diunggulkan karena memiliki alat penerangan berupa PLTA. Dari kedua distrik ini memiliki kesamaan yang mana memiliki daerah rawan longsor karena memiliki jenis tanah yang tidak labil apa lagi memiliki tingkat curah hujan yang sangat tinggi. Secara pengalaman, Kurima lebih diunggulkan ketimbang Tangma karena Kurima adalah salah satu distrik yang sudah menjalankan sistem pemerintahan lebih lama ketimbang Tangma. Maka hal ini dianggap Kurima lebih layak walau memiliki kekurangan dari distrik Tangma.

Regionalisasi dari wilayah calon Kabupaten Kurima dapat dilihat dari aspek homogenitas, aspek nodalitas dan aspek administrative/kebijakan. Dari aspek homogenitas, pengelompokan wilayah dapat

dilakukan dengan pertimbangan menyatukan kesatuan masyarakat (bahasa, adat-istiadat, perkawinan, kematian, dan silsilah keturunan) berdasarkan kelompok suku atau kedekatan secara jangkauan kepemimpinan lokal. Berdasarkan homogenitas ini ada distrik yang masuk sebagai calon wilayah. Distrik-distrik ini tergabung ke dalam konfederasi lima suku yang ada di Kabupaten Yahukimo yaitu Yali, Hubla, Kimyal, Momuna dan Me. Kelompok Yali

menurunkan suku-suku seperti suku Pahabol, Mirin, Balingga, Maling, Silak, Kobak yang sebarannya terkonsentrasi pada distrik Ninia Sementara kelompok Hubla menurunkan suku-suku seperti Hese gem, Matuan, Siep, Asso, Wetipo, Hese lo, Sekenyap, Meage, Elopore, Yelemaken, yang sebarannya pada distrik Kurima.



Sumber: Analisis 2013

GAMBAR II. PETA PENGELOMPOKAN SUKU

Aspek yang disiapkan dan dipertimbangkan didalam mempersiapkan suatu daerah adalah: a) Kependudukan, b) Lahan, c) Infrastruktur fisik seperti jaringan jalan, jaringan pelintasan/bandar udara, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik/energi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana permukiman, d) Kelembagaan dan SDM Pemerintahan, e) Manajemen Konflik dan Demokrasi, f) Kapasitas Ekonomi, g) Kapasitas Sosial Budaya dan Politik.

Berdasarkan data pertumbuhan penduduk tahun 2008, Kabupaten Yahukimo terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Yahukimo saat ini berjumlah 223.949 jiwa. Distrik dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kurima yaitu 9.637 jiwa dan jumlah penduduk terkecil adalah Duram yaitu 2.190 jiwa. Kurima dengan jumlah penduduk terbesar dibanding seluruh distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo, maka dapat dikatakan memenuhi syarat jika dimekarkan menjadi kabupaten baru. Dilihat dari potensi SDA, Pertumbuhan ekonomi, luas wilayah, kepadatan penduduk, bahkan jumlah kampung dari 15 distrik yang menjadi wilayah administrasi distrik Kurima. Jumlah penduduk dari seluruh wilayah administrasi distrik Kurima adalah 70.875 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 20 jiwa/km² dan luas wilayah 3.535,55km².

Dari ukuran luas wilayah, Kurima memang merupakan wilayah yang sangat luas dibanding dengan distrik lain di Kabupaten Yahukimo. Dalam proses pemekaran Kabupaten Yahukimo pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Kurima adalah kriteria utama pemekaran Kabupaten Yahukimo karena pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk terbanyak dan potensi SDA yang besar. Selain itu daya tarik wisatawan akan distrik ini sangat besar dimana diperkirakan tiap tahunnya hampir 600-800 turis mancanegara yang datang dengan menghabiskan uang sekitar ±200-380 jutaan untuk membayar biaya perjalanan dan fasilitas serta membayar jasa yang disediakan di distrik Kurima.

Kurima memang jauh dari jangkauan dunia luar sehingga orang yang mungkin

pertama kali menginjakkan kaki disana dengan segala pemahaman bahwa Papua sebagai daerah yang tertinggal dan terbelakang berfikir bahwa Kurima sebagai daerah pedalaman sama saja dengan distrik lainnya di Kabupaten Yahukimo. Namun Kurima dengan kesiapan infrastruktur fisik dapat dikatakan siap jika nantinya dimekarkan menjadi Kabupaten Baru. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan akses terutama jalan adalah hal yang paling utama. Kurima dalam hal ini sudah memadai bahkan dari kondisi jalanpun cukup baik untuk dilintasi mobil dan motor walau jalannya tidak diaspal. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan akses yang menghubungkan antar tiap distrik yang termasuk dalam wilayah Kurima. Kurima memiliki 3 bandar udara yang sampai hari ini masih beroperasi terutama pesawat-pesawat kecil seperti Cezna berkapasitas penumpang 12 dan yang berkapasitas 6, dan Helicopter. Kurima memang secara permanen belum mempunyai pusat jaringan telekomunikasi namun jaringan untuk berkomunikasi lewat Handphone, TV, Radio. Untuk jaringan Listrik sudah cukup memadai terutama di wilayah Kurima dan distrik yang berdekatan dengan pusat distrik Kurima. Sedangkan alternatif lain yang digunakan bagi daerah-daerah yang jauh adalah menggunakan energy Solarek dimana energi ini didapat dari sinar matahari. Untuk mengembangkan jaringan listrik di wilayah Kurima menggunakan PLTA karena wilayah ini mempunyai aliran sungai yang deras.

Team dari Jakarta bekerja sama dengan pemerintah provinsi Papua beserta Kabupaten-kabupaten pegunungan tengah sepakat dimana tahun 2014 Kurima akan menjadi pusat pensuplay energy listrik untuk semua wilayah di pegunungan Papua. Ketersediaan air di Kurima sangat memadai. Wilayah yang mempunyai curah hujan tinggi serta wilayah yang berbukit-bukit membuat ketersediaan air lebih dari yang dibutuhkan karena mata air bersih dari gunung serta aliran sungai balim yang deras membuat masyarakat daerah setempat tidak susah untuk mendapatkan air bersih walau tidak disuplay dari PDAM. Prasarana permukiman untuk wilayah yang baru mau dimekarkan dapat dikatakan cukup memadai karena unit-

unit pelayanan pendidikan dan kesehatan, kantor-kantor pemerintahan dan aparat keamanan, hal ini menunjukkan bahwa secara infrastruktur cukup memadai. Ketersediaan infrastruktur fisik di Kurima ini sangat menguntungkan bagi Kurima sendiri. Dengan mempertimbangkan luasnya wilayah distrik Kurima, maka semula hanya 4 distrik dimekarkan lagi 11 distrik sehingga menjadi 15 distrik. Hal ini sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2007 bahwa dalam upaya pemekaran distrik harus memiliki 5 distrik. Namun dengan melihat jumlah distrik, tidak dipungkiri lagi jika Kurima bisa dimekarkan menjadi Kabupaten baru.

Pemerintahan yang selama ini terlihat jelas tidak terfokus pada pemerintahan pusat yaitu Kabupaten Yahukimo, namun peran gereja, tokoh adat (kepala suku), tokoh perempuan dan tokoh pemuda sangat besar. Peran dari tokoh-tokoh ini justru dalam taraf tertentu mampu menjadi fasilitator bagi pemerintah dan masyarakat di level lokal. Ketika pemerintah tidak mampu menjalankan fungsinya maka gereja, tokoh pemuda dan perempuan mampu menutupi fungsi-fungsi tersebut. Contoh, gereja bekerja sama dengan WVI (World Vision Indonesia), membangun yayasan berupa pendidikan berpola asrama bagi anak buta huruf, pemberantasan buta aksara bagi lansia, perbaikan gizi bagi anak-anak dan pemberian imunisasi bagi balita, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu dalam bidang pendidikan.

Kuatnya adat istiadat yang sudah dibangun oleh masyarakat Kurima selama bertahun-tahun dengan keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama selama ini menjadi modal dasar dalam menyelesaikan konflik maupun kehidupan bersosial. Tradisi demokrasi yaitu berdialog dan bebas mengeluarkan pendapat ini sudah dikenal dan dibangun oleh masyarakat Kurima sejak dulu. Masyarakat Kurima mempunyai mekanisme tradisional dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi. Salah satu model yang dimiliki masyarakat tradisional disebut 'duduk dihonai'. Tradisi ini adalah gambaran bahwa permasalahan yang terjadi harus diselesaikan dengan berdialog. Didalam proses ini para

tokoh adat (kepala suku), pemuda dan perempuan dilibatkan dan para pemimpin kelompok sosial mencoba mencari pemecahan permasalahan. Setiap orang bebas mengemukakan pendapat tanpa adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan maupun usia. Perdebatan ini sangat sering digunakan kata-kata kasar sejauh kata-kata yang digunakan itu tidak merendahkan harga diri orang lain. Itu yang dikenal disana dengan sebutan 'baku maki'. Namun akhir dari proses 'duduk dihonai' ini dengan segala keputusan yang diambil, maka semua orang harus saling memaafkan.

Selain itu adalah Gereja. Dalam hal ini, masyarakat Kurima sudah bertahun-tahun sangat yakin dan mempercayai fungsi gereja hadir didalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Baik dalam kehidupan pribadi, kelompok, suku bahkan gereja juga dapat menjadi alat pemersatu dan penyelesaian konflik. Baik konflik antar kelompok, suku, bahkan rasis. Hal ini karena peran gereja yang sangat baik dimana hadir dengan memberi ketenangan terutama didalam batin masyarakat dan masyarakat meyakini akan hal itu. Kurima secara umum memiliki basis-basis penting bagi pengembangan daerah kedepan. Sumber daya ini menyangkut produk-produk ekonomi yang sangat diunggulkan di Kurima yaitu Pertanian dan Peternakan. Dengan karakter wilayah yang didominasi oleh perbukitan yang luas, masyarakat Kurima sangat bergantung pada pertanian dan peternakan. Walaupun kondisi geografis demikian, ada juga sektor-sektor produksi lain yang berpotensi.

Kurima dikenal dengan penghasil sayur-sayur terbaik dan terbesar untuk seluruh Papua, bahkan sampai Makassar. Jenis produksi/ha tertinggi adalah wortel (2,5 ton/ha) terutama terdapat di Kurima, disusul kentang (1,2 ton/ha), kubis (0,5 ton/ha), tomat (0,3 ton/ha), dan Buncis (0,2 ton/ha). Produksi ini dapat meningkat karena wilayahnya sangat potensial tanpa menggunakan pupuk kimia. Sayur-sayuran juga banyak diproduksi di daerah pegunungan. Yang paling potensial adalah ubi-ubi lain (2,0 ton/ha), cabe (rata-rata 2,2 ton/ha), bayam (0,18 ton/ha), dan Bawang

putih (rata-rata 0,6 ton/ha), Petsai (0,6 ton/ha), dan Bawang Merah (0,2 ton/ha), Terong (0,1 ton/ha). Sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, Kurima dengan potensi pertaniannya sangat berpotensi dalam menghasilkan produksi ini dengan konstan.

4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah menjadi jawaban dari tujuan utama penelitian ini yaitu menemukan alternatif terpilih yang nantinya digunakan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Yahukimo, khususnya pengembangan Distrik Kurima. Alternatif terpilih dari kajian ini adalah Distrik Kurima dimekarkan menjadi kabupaten baru. Alternatif terpilih tersebut berdasarkan kriteria yang ditentukan dan diolah menggunakan perhitungan *Expert Choice* sehingga diperoleh hasil yaitu Pemekaran Wilayah Kurima menjadi kabupaten baru serta dengan pertimbangan-pertimbangan lain seperti kondisi rill pembangunan di Kurima, pernyataan dari masyarakat yang ingin memisahkan diri, memiliki potensi besar untuk berkembang jika menjadi Kabupaten baru karena luas wilayah yang ada, SDA serta SDM yang cukup memadai. Cakupan dari wilayah Kurima adalah 15 distrik, yaitu Kurima, Tangma, Ukha, Mugi, Yogosem, Samenage, Pasema, Werima, Silimo, Amuma, Usama, Hogio, Musaik, Suru-Suru, Obio. Ke 15 distrik inilah yang masuk kedalam cakupan wilayah kabupaten Kurima nantinya yang mana distrik-distrik ini dipilih berdasarkan jarak, akses, kesamaan bahasa, budaya, adat istiadat, suku dan sejarah nenek moyang yang dimana hal tersebut menjadi dasar yang kuat. Hal ini dipandang positif yang nantinya bisa mendorong pertumbuhan pembangunan.

Distrik Kurima menjadi salah satu wilayah alternatif yang akan menjadi ibu kota kabupaten. Berdasarkan kesiapan dan sarana prasarana maupun fasilitas fisik yang ada seperti aksesibilitas yang baik dan juga akses menuju distrik lain tersedia, lapangan terbang, sarana pendidikan dari TK-SMU, fasilitas kesehatan (puskesmas), fasilitas pemerintahan (kantor camat, lurah) fasilitas perkembangan ekonomi (pasar dan supermarket kecil), fasilitas keamanan (polsek

dan koramil). Selain itu, Kurima juga memiliki luas wilayah yang besar dibanding distrik lain bahkan Distrik lain yang masuk sebagai calon ibukota, dan memiliki dataran yang rata. Secara pengalaman, Kurima adalah salah satu distrik yang sudah menjalankan sistem pemerintahan lebih lama. Maka hal ini dianggap Kurima lebih layak walau memiliki kekurangan dari distrik Tangma. Kurima sebagai daerah otonomi baru memiliki kapasitas yang kuat untuk menjadi sebuah kabupaten. Hal ini tercermin dari potensi ekonomi, kapasitas sosial politik terutama dalam bentuk budaya demokrasi dan manajemen konflik serta kesiapan infrastruktur fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja, HAW. 2001. *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soekartawi, Dr. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. CV. Rajawali. Jakarta
- Warpani, Suwardjoko, 1980. *Analisis Kota dan Daerah*. ITB. Bandung
- Dwidjowiyoto Raian Nugroho, 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi tanpa Revolusi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Usman Sunyoto, Dr. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar
- Budihardjo, Eko. *Tata Ruang Perkotaan*. PT. ALUMNI
- Sutikno, SE. ME. & Maryunani, Dr. SE. MS. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam*. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Yunus, Hadi, 1995. *Pengarah Pemahaman Pengertian Kota*, Yogyakarta. Fakultas Geografi UGM.
- Jayadinata, JT. 1999. *Tata Guna Lahan dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung. Penerbit ITB
- Koesoemahatmadja, R.D.H, 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bina Cipta Jakarta
- William G. Cochran, 1991. *Teknik Penarikan Sampel*. Terjemahan; Rudiansyah. Universitas Indonesia. Jakarta
- Pamudji S, 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintah*, PT. bina Aksara, Jakarta
- Saragih JPN. Drs dan Sitorus S. *Mekanisme Pemerintahan di Daerah Beserta*

- Peraturan Pelaksanaannya*.PT. Twins.
Jakarta
- R. Bintarto. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*.PT. Ghalia Indonesia.
Jakarta
- Singarimbun, M & Effendi S, 1989.*Metodologi dan Penelitian Survei*.LP3ES. Jakarta
- Sitohang, Paul, 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*, terjemahan dari Glasson, John, Regional Planning, FE UI
- Muh. Sunggaidi Ardani, 1999. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar (anggota IKAPI)
- Djojodipuro Marsudi, 1992. *Teori Lokai*. Fakultas Ekonomi, UI. Jakarta